BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mikro syariah diantaranya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan utamanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi karena perkembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha. (Retnoningsih, 2015, hlm. 1)

Kegiatan BMT dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, hanya saja pada masa itu belum berbentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri. Melainkan pada semua uang dan kekayaan yang terkumpul dari berbagai sumber langsung dibawah kendali Nabi, sehingga beliaulah yang langsung membagi kepada pos-pos yang telah ditetapkan. Di Indonesia *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) mulai populer diperbincangan oleh insan perekonomian terutama dalam perekonomian Islam yaitu sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia.

Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, atau shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil. (Sa'adah,

2013, hlm. 95)

Secara konseptual BMT mencakup dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Menurut fungsinya adalah *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *Baitul Tamwil* bertugas sebagai lembaga bisnis yang memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan yang bersifat *profit sharing*, seperti pemberian pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *rahn* dan lain sebagainya. (widodo and dkk, 1999, hlm. 36)

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan BMT memiliki dua fungsi utama yaitu penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Dalam kegiatan penyaluran dana lembaga syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Di sebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena lembaga syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. (Arifin, 2006, hlm. 200)

Dari sekian banyak produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT, dikenal salah satu produk yang sangat diminati dan dipakai oleh masyarakat, yaitu produk *Rahn*. *Rahn* berkembang pasca diterbitkannya Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Sejak saat itu *rahn marak* berkembang diberbagai lembaga keuangan. Dan minat masyarakat terhadap jasa *rahn* pun kian meningkat.

Rahn merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi dan biaya jasa simpan barang jaminan (*ujroh*). Dalam transaksi *rahn* dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Jika dalam praktik *rahn* ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan marhun bih, yang biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran. Jika *rahn* dihitung berdasarkan “sewa” barang atau berdasarkan uang yang dipinjamkan maka *rahn* ini merupakan penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba. (Habiburrahman, 2012, hlm.3)

Tetapi ada berbagai opini pro dan kontra yang dikemukakan baik dari masyarakat umum maupun para ahli ekonomi syariah, atas kesesuaian praktik gadai syariah dengan konsep yang ada. Diantara pihak yang mendukung mengatakan bahwa praktik gadai syariah yang ada saat ini sah-sah saja selama tidak ada pihak yang dirugikan serta *rahin* dan *murtahin* saling sepakat dengan perjanjian yang dibuat. Seperti, mengenai beban biaya simpan yang dikenakan kepada nasabah, hukumnya sah sesuai dengan hadis riwayat *Sya'bin* dari *Abu Hurairah RA*. Yang mana dengan demikian biaya simpan hukumnya boleh sebagai biaya perawatan barang yang digadaikan.

Selain itu, yang memiliki argumen kuat terkait tentang keraguan atas praktik gadai syariah di Indonesia. Pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (akad *rahn*) dan akad *ijarah* (biaya simpan). Nasabah yang menggadaikan barangnya

akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai dengan hitungan lembaga, dan selanjutnya nasabah wajib membayar “jasa pemeliharaan” barang yang ditetapkan bank.

Yang kedua, terjadi riba walaupun disebut dengan istilah “biaya simpan” atas barang gadai dalam akad *rahn* (utang) antara lembaga keuangan dengan nasabah. Sebab dalam akad *rahn* tidak menarik manfaat baik berupa hadiah, uang atau manfaat lainnya. Kemudian yang ketiga, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, pihak *murtahin* disebut membebankan biaya simpan berdasarkan nilai pinjaman yang tidak diperbolehkan.

Untuk mengetahui perbandingan antara konsep dan praktek gadai syariah diperlukan peraturan yang menjadi standar yang baku dan di akui di Indonesia maupun secara global. Konsep dalam hal ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). (Afdhila, 2016)

Dalam pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarif *ujroh* yang secara substantif masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Selain hal tersebut, dalam hal penjualan barang jaminan apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syaiah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Dengan mempertimbangkan kesamaan operasional pada seluruh kantor lembaga keuangan syariah yang juga memiliki produk pembiayaan yang menggunakan akad *Rahn* , maka penulis memilih BMT Al-Karomah Martapura sebagai objek penelitian. Penulis memilih Kantor BMT Al-Karomah Martapura

karena merupakan salah satu lembaga keuangan syariah resmi di Indonesia yang juga bergerak pada bidang penyaluran salah satunya pembiayaan dengan menggunakan akad *Rahn*.

BMT Al-Karomah Martapura menjadi lembaga yang sangat penting bagi masyarakat dan merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang ada di Martapura. Salah satu produk pembiayaan yang diterapkan adalah menggunakan akad *Rahn*, yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan hutang.

Perjanjian akad *Rahn* dibolehkan dalam Islam, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/1: 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ ۖ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/1; 283). (Kementrian Agama RI, 2002, hlm. 37)

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu, dan Rasulullah SAW menggadaikan baju besi dari seorang Yahudi tersebut (sebagai agunan).” (Hadis Riwayat Al-Bukhari, dan Muslim). (As-Syakuni, 1999, hlm. 650)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara muslim dan non-muslim dalam bidang bermuamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim. (Suhendi, 2004, hlm. 107)

Dalam ayat Alquran dan hadis di atas dapat penulis simpulkan bahwa Islam membolehkan adanya barang jaminan dalam utang-piutang. Barang jaminan itu sebagai alat kepercayaan di antara keduanya. Karena kegiatan transaksi tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan seorang Yahudi. Dan transaksi ini biasa dikenal dalam masyarakat kita dengan istilah gadai.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan dibahas dan dijelaskan bagaimana implementasi pembiayaan akad *Rahn* serta apakah implementasi pembiayaan *Rahn* di BMT Al-Karomah Martapura telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Alasan-alasan yang penulis paparkan diatas, kiranya dapat mewakili maksud dari penulis maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian yaitu tentang “**Analisis Implementasi Pembiayaan Akad *Rahn* Pada BMT Al-Karomah Martapura**

”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan akad *Rahn* pada BMT Al-Karomah Martapura?
2. Apakah penerapan pembiayaan akad *Rahn* pada BMT Al-Karomah Martapura sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi dari Pembiayaan akad *rahn* pada BMT Al-Karomah Martapura.
2. Mengetahui bagaimana kesesuaian produk pembiayaan *Rahn* pada BMT Al-Karomah Martapura dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Secara ringkas manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi BMT Al-karomah Martapura yaitu hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan Pembiayaan yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
2. Bagi Program Studi Perbankan Syariah yaitu dapat menambah dan

melengkapi pengetahuan tentang pembiayaan *Rahn*. Juga memberi wawasan dan pemahaman serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi penulis yaitu memperoleh data dan bukti yang sangat signifikan terhadap permasalahan yang diteliti, menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dan pembentukan pola berpikir dalam mengetahui bagaimana Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn* Pada BMT Al-Karomah Martapura.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarah. Diantaranya Analisis, implementasi, Fatwa DSN-MUI, pembiayaan, dan BMT.

1. Analisis menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Salim, 2002, hlm. 4) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangannya dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat. Analisis yang penulis maksud yaitu mengamati dan menguraikan secara detail pembiayaan akad *rahn* pada BMT Al-Karomah Martapura.
2. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 548) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi yang penulis maksud yaitu pelaksanaan atau penerapan pembiayaan akad *rahn* serta

apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan tersebut.

3. Pembiayaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 196) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, secara etimologi yaitu membiayai kebutuhan usaha. pembiayaan yang penulis maksud yaitu pembiayaan akad *rahn* yang mengharuskan adanya jaminan dalam utang piutang.
4. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil. BMT yang di maksud penulis adalah BMT Al-Karomah Martapura.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis rasa sangat relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Rico Febriawan (2017) Judul. *Implementasi akad rahn pada produk pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggun*, UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme operasional Pembiayaan *Rahn* di BMT Marhamah Cabang Bansari melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian BMT menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh BMT. Akibat dari penyimpanan tersebut maka anggota akan dikenakan biaya-biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan. Pembiayaan *Rahn* di BMT Marhamah Cabang Bansari menggunakan akad *rahn*, anggota cukup menjaminkan barang

yang bernilai ekonomis yang digunakan sebagai agunan. Agunan ini digunakan sebagai prinsip kehati-hatian dalam Islam. Pembiayaan *Rahn* di BMT Marhamah Wonosobo telah sesuai dengan pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan data sekunder dengan analisis deskriptif. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang menggunakan akad *rahn* sedangkan perbedaannya hanya terletak pada lokasi penelitian.

2. Awaliyah (2019) Judul. *Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) di pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*, UIN Antasari Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, perlakuan akuntansi gadai syariah (*RAHN*) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang meliputi: pengakuan, pengukuran, dan penyajian pengungkapan sudah sesuai berdasarkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 107 tentang akad ijarah. Kedua, mengetahui akad ijarah gadai emas (*RAHN*) PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dari segi pembiayaan perawatan dan pemeliharaan, pembiayaan administrasi, pembiayaan jaminan berdasarkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis deskriptif. Persamaan dengan penelitian yang penulis sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan *rahn*. Dan perbedaan dengan penulis lakukan adalah pada

subjek dan maksud pembahasan dalam penelitian.

3. Abu Labuba (2020) judul. *Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah cabang Tukmudal-Sumber-Cirebon)* IAI Bunga Bangsa Cirebon. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rukun akad *rahn* secara praktik mulai dari *marhun*, *marhun bih*, *shighah*, dan *'aqidaini* sudah sesuai dengan dengan teori syariah, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperjelas untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah. Yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak *rahin* maupun dari pihak *murtahin*. Penelitian ini menggunakan metode analisa data menggunakan diskriptif analisis. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi akad *rahn* tetapi dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis implementasi pembiayaan *rahn* berdasarkan prinsip syariah.
4. Siti Farihah (2017) Judul. *Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25DSN-MUI-III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yaitu dalam praktiknya di Pegadaian Syari'ah Majapahit Semarang ketika *marhun* dijual dan hasil dari penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka pihak *murtahin* tidak meminta kekurangannya, tetapi dalam Fatwa DSN dan Surat Bukti *Rahn*, *Rahin* wajib melunasi

kekurangan hutang tersebut. Jika *rahin* tidak memenuhi kewajibannya maka akan menimbulkan kerugian dari pihak *murtahin*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat non statistik. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama menganalisis pembiayaan rahn salah yaitu pada penjualan *marhun*. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. BAB II Landasan Teori, pada bab ini diuraikan tentang penjelasan mengenai beberapa teori-teori umum yang berkaitan dengan bahasan penelitian dengan objek yang didapat dari buku dan literatur.
3. BAB III Metode Penelitian, pada bab ini disajikan informasi yang menjelaskan tentang hubungan antara teoritis dengan penelitian lapangan oleh penulis, maka dibuatlah tahapan penelitian yang teratur yang terdiri dari jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan tahapan penelitian yang sesuai dengan permasalahan penulis.
4. BAB IV berisi penyajian data, pada bab ini berisi hasil laporan penelitian

dan analisis data yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi pembiayaan akad *rahn* pada BMT Al-Karomah Martapura.

5. BAB V penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.